

**MENAKAR EFEKTIVITAS PENGELUARAN REGIONAL TERHADAP
INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA: TELAAH FUNGSI
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI TAHUN 2013-2022**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH

FILIPUS PANDITO F.S

12200543

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGAKARTA

2024

HALAMAN PENGAJUAN

Diajukan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

FILIPUS PANDITO FIRMAN SAKTI

12200543

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filipus Pandito Firman Sakti
NIM : 12200543
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“MENAKAR EFEKTIVITAS PENGELUARAN REGIONAL TERHADAP
INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA: TELAAH FUNGSI
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI TAHUN 2013-2022”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 April 2024

Yang menyatakan



(Filipus Pandito F.S)
12200543

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“MENAKAR EFEKTIVITAS PENGELUARAN REGIONAL TERHADAP INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA: TELAAH FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
EKONOMI TAHUN 2013-2022”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

FILIPUS PANDITO F.S

12200543

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 19 Juni 2024

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.
(Ketua Tim Penguji)
2. Pristanto Silalahi, S.E., M.S.E.
(Dosen Penguji)
3. Albertus Henri Listyanto Nugroho, S.E., M.Sc.
(Dosen Pembimbing)







Yogyakarta, 26 Juli 2024

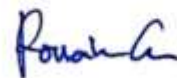
Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.



Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**MENAKAR EFEKTIVITAS PENGELUARAN DAERAH PADA INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA: TELAAH FUNGSI PENDIDIKAN,
KESEHATAN, DAN EKONOMI TAHUN 2013-2022**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 7 Juni 2024



Filipus Pandito Firman Sakti

12200543

HALAMAN MOTTO

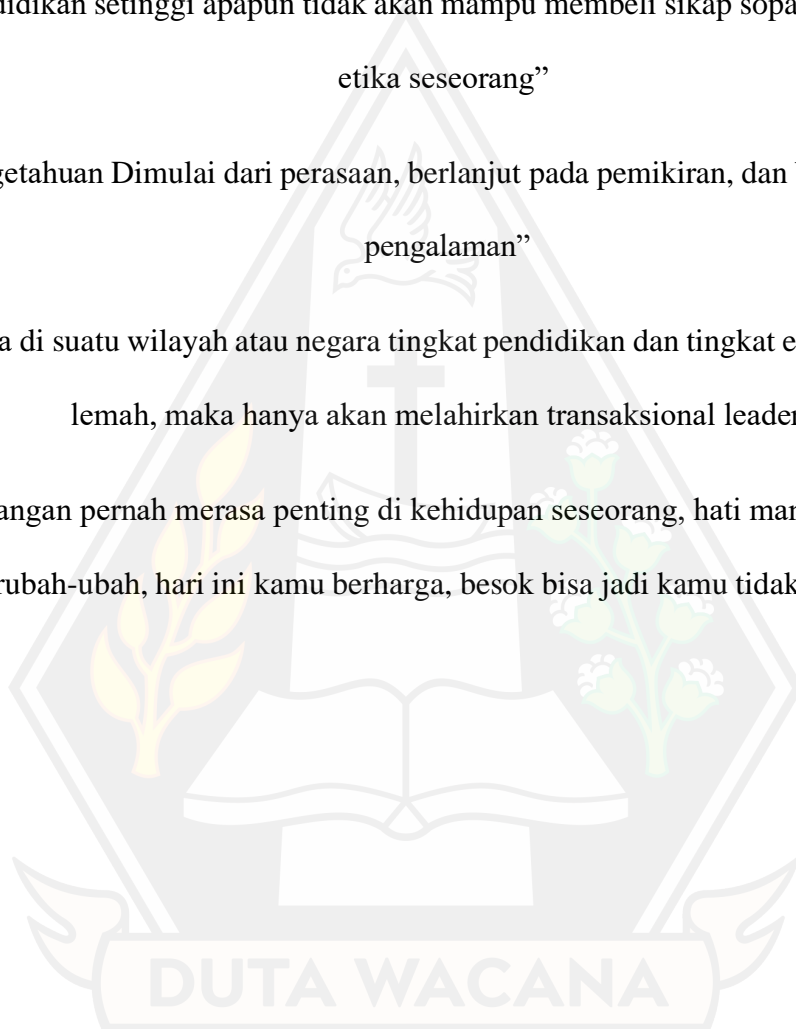
“Gelar sarjana, menulis skripsi, membaca beberapa buku, tapi masih saja aku salah membaca. Kamu menulis Apa kabar dan aku membacanya Aku merindukanmu”

“Pendidikan setinggi apapun tidak akan mampu membeli sikap sopan santun dan etika seseorang”

“Pengetahuan Dimulai dari perasaan, berlanjut pada pemikiran, dan berakhir pada pengalaman”

“Jika di suatu wilayah atau negara tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya lemah, maka hanya akan melahirkan transaksional leader”

“Jangan pernah merasa penting di kehidupan seseorang, hati manusia bisa berubah-ubah, hari ini kamu berharga, besok bisa jadi kamu tidak berguna”



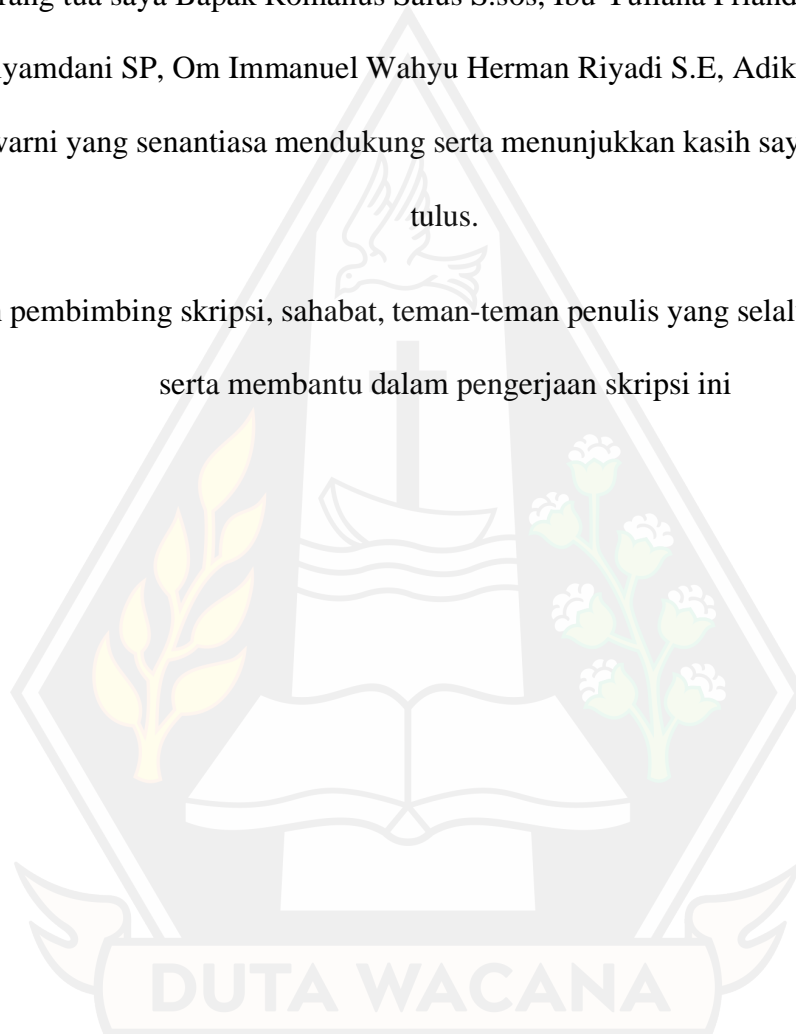
HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Malaikat Pelindung yang selalu menuntun jalan,
memberi pengharapan, serta penghiburan.

Orang tua saya Bapak Romanus Salus S.sos, Ibu Yuliana Priandari, Bude
Priyamdani SP, Om Immanuel Wahyu Herman Riyadi S.E, Adik Veronika
Mawarni yang senantiasa mendukung serta menunjukkan kasih sayang dengan
tulus.

Dosen pembimbing skripsi, sahabat, teman-teman penulis yang selalu mendukung
serta membantu dalam pengerjaan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga Skripsi dengan judul **Menakar Efektivitas Pengeluaran Regional terhadap Indikator Pembangunan Manusia: Telaah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Tahun 2013-2022** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Proses pengerjaan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, dan bantuan kepada:

1. Tuhan Yesus /Entitas Tunggal atas segala berkat dan kasih-Nya turut dalam memberikan kelancaran dalam berbagai dinamika pada saat proses penyelesaian Skripsi.
2. Pak Albertus Henri Listyanto Nugroho S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
3. Keluarga, orang tua Bapak Romanus Salus S.sos, Ibu Yuliana Priandari, Bude Priyamdani SP, Om Immanuel Wahyu Herman Riyadi S.E, Adik Veronika Mawarni, dan seluruh handai taulan yang telah memberikan saya dukungan moral, emosional, dan materil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang telah memberikan kepada saya akses pendidikan dan beasiswa Talenta.
5. Wanita yang pernah menjadi penyemangat saya selama kuliah. Walaupun kita sebentar dalam menjalin hubungan. Semoga kita dapat berjumpa kembali.

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan selama proses penyelesaian Skripsi ini karena adanya keterbatasan penulis dan hasil akhir yang kurang sempurna. Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran guna untuk mengevaluasi penulis kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

Yogyakarta, 7 Juni 2024



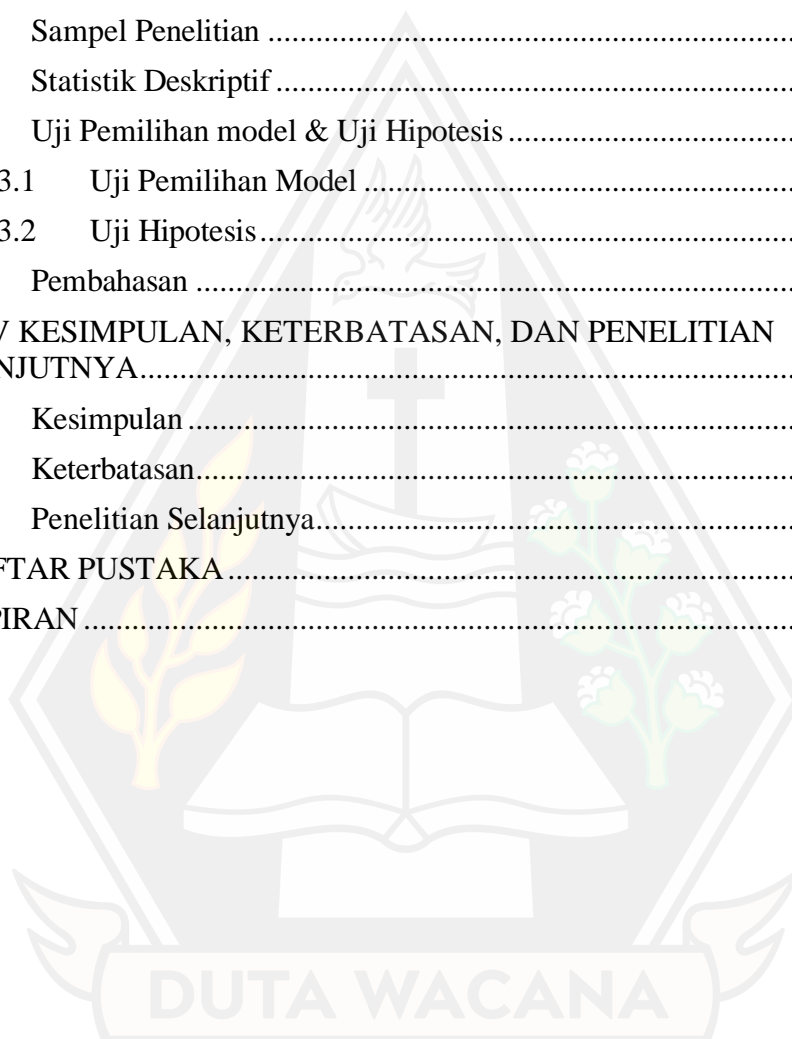
Filipus Pandito F.S



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Komponen dan Tautan.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kontribusi Penelitian	6
1.6 Lingkup dan Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal	8
2.1.2 Teori Keynes	9
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	11
2.2.1 Pengertian	11
2.2.2 Fungsi APBD.....	11
2.2.3 Klasifikasi Belanja Daerah	12
2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	17
2.3.1 Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	23
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Data dan Sumber	31
3.2 Definisi Variabel dan Pengukurannya	31
3.3 Desain Penelitian	35

3.4	Model Statistis dan Uji Hipotesis.....	37
3.4.1	Uji Simultan (Uji-F)	38
3.4.2	Uji Parsial (Uji-t).....	38
3.4.3	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	38
3.4.4	Uji Chow	39
3.4.5	Uji Hausman.....	39
3.4.6	Uji Lagrange Multiplier (LM)	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Sampel Penelitian	41
4.2	Statistik Deskriptif	43
4.3	Uji Pemilihan model & Uji Hipotesis	45
4.3.1	Uji Pemilihan Model	45
4.3.2	Uji Hipotesis.....	47
4.4	Pembahasan	55
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN PENELITIAN SELANJUTNYA.....		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Keterbatasan.....	70
5.3	Penelitian Selanjutnya.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		74



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Variabel dan Pengukurannya	31
Tabel 4.1 Sampel Penelitian	31
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	31
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	31
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	31
Tabel 4.5 Hasil Uji LM	31
Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis	50
Tabel 4.8 Definisi Variabel dan Pengukurannya	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komponen dan Tautan.....5



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Uji Hipotesis Statistik	74
Lampiran 2 Uji Hipotesis Utama (Model 1).....	76
Lampiran 3 Uji Hipotesis Utama (Model 2).....	78
Lampiran 4 Uji Hipotesis Tambahan (Model Leg -1).....	82
Lampiran 5 Uji Hipotesis Tambahan (Model Leg-2).....	83
Figure 6 Lampiran Uji Hipotesis Tambahan (Model Leg -3).....	84
Figure 7 Lampiran Uji Hipotesis Tambahan (Model Leg -4).....	85
Figure 8 Lampiran Uji Hipotesis Tambahan (Model Leg -5).....	86
Figure 9 Lampiran Uji Hipotesis Tambahan (Model HHSL).....	87
Figure 10 Lampiran Uji Hipotesis Tambahan (Model RRLS)	88
Lampiran 11 Uji Hipotesis Tambahan (Model HLS).....	89
Lampiran 12 Uji Hipotesis Tambahan (Model PPD)	90
Lampiran 13 Kartu Konsultasi Skripsi	91
Lampiran 14 Hasil Turnitin.....	92
Lampiran 15 Halaman Persetujuan.....	93
Lampiran 16 Lembar Revisi.....	94
Lampiran 17 Poin Keaktifan.....	95
Lampiran 18 Cover Lama	96

**MENAKAR EFEKTIVITAS PENGELUARAN REGIONAL TERHADAP
INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA: TELAAH FUNGSI
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI TAHUN 2013-2022**

Filipus Pandito Fiman Sakti

12200543

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: 12200543@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas pengeluaran regional terhadap Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh efektivitas pengeluaran daerah terhadap IPM. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan memperluas objek penelitian yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia periode 2013-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan kuat secara langsung antara pengeluaran fungsi pendidikan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara untuk fungsi kesehatan tidak menemukan hubungan kuat secara langsung terhadap IPM, akan tetapi memiliki hubungan kuat terhadap indikator untuk mengukur IPM yaitu angka harapan hidup saat lahir. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya skor IPM di beberapa daerah di Indonesia dikarenakan ketidak efektivitasnya kebijakan anggaran oleh pemerintah di daerah.

Kata Kunci: *Pengeluaran Regional, Indikator Pembangunan Manusia, Kebijakan Anggaran, Pemerintah Daerah, Akuntansi Sektor Publik*

**MEASURING THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL EXPENDITURES
ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDICATOR: STUDY OF THE
FUNCTIONS OF EDUCATION, HEALTH, AND THE ECONOMY 2013-
2022**

Filipus Pandito Fiman Sakti

12200543

*Departement of Accounting, Faculty of Bussiness
Duta Wacana Christian University, Indonesia*

Email: 12200543@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate the effectiveness of regional expenditure on the Human Development Indicator (HDI) in Indonesia. This study examines the effect of the effectiveness of regional expenditure on HDI. This research provides novelty by expanding the research object to cover all provinces in Indonesia for the 2013-2022 period. This study uses a quantitative approach with data sourced from secondary data. This study found that there is a strong direct relationship between expenditure on educational and economic functions on the human development indicator. Meanwhile, for health function, it did not find a strong relationship directly with HDI, but had a strong relationship with indicators to measure HDI, namely life expectancy at birth. Thus, this study concludes that the low HDI score in several regions in Indonesia is due to the ineffectiveness of budget policies by local governments.

Keywords: *Regional Expenditure, Human Development Indicator, Budget Policy, Local Government, Public Sector Accountin*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mengatur penggunaan dana daerah, KEMENDAGRI telah menerbitkan Peraturan Menteri No.84 Tahun 2022. Peraturan ini berisikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD untuk tahun 2023, terutama terkait dengan kebijakan belanja daerah. Di dalam peraturan tersebut pemangku kepentingan (regulator) diwajibkan menyusun program pembangunan daerah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta pencapaian target pembangunan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Selain itu juga, pada peraturan perundang-undangan ini memuat pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang mengarahkan masing-masing pemerintah daerah di Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan (PERMENDAGRI, 2023).

Sebelum masuk ke fenomena (gap) dari penelitian ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi pengeluaran (belanja) daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM). Nella et al., (2023) menyebutkan bahwa dalam penelitian sebelumnya pengeluaran daerah adalah bagian instrumen dari sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan investasi. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna keperluan akumulasi modal dan menaikkan pendapatan yang merupakan bentuk upaya dari meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu. Kemudian, definisi IPM menurut

Noviatamara et al., (2019) dalam penelitiannya merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas hidup individu didalam masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari penelitian sebelumnya (Hasan, 2021) menyatakan bahwa kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia masih tinggi dan terjadi ketimpangan antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan IPM dari BPS sepuluh provinsi di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki skor IPM terendah. Hal tersebut jauh berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat seperti DKI Jakarta, Riau, DIY, dan Kepulauan Riau yang skor IPM berada pada posisi stabil hingga tinggi. Dari informasi tersebut, mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di tiap provinsi di Indonesia tidak terjadi secara massif. Ketidakmerataan pembangunan kualitas SDM menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran, kurangnya tingkat literasi, dan kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan domestik bruto (PDB) perkapita yang kecil (Anantika & Sasana, 2020).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Pada dasarnya, undang-undang ini bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya fiskal. Desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian dalam pengelolaan aset, sistem keuangan daerah dan pengelolaan ekonomi lokal. Pemberian kewenangan keuangan yang lebih besar kepada daerah diharapkan dapat menguatkan

kemampuan ekonomi masing-masing wilayah, sehingga pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sandjaja et al., 2020).

Dikutip dari Tempo (2023) KEMENDAGRI menemukan data terkait penyerapan Dana Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) baik untuk belanja maupun pendapatan masih belum optimal pada akhir Agustus 2023. Per 31 Agustus 2023, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten kota sebanyak Rp 679,81 triliun atau 54,88 persen dari keseluruhan angka pendapatan daerah. Adapun realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota per periode yang sama sebesar Rp 603,79 triliun atau 46,71 persen dari keseluruhan angka anggaran belanja daerah. Dari angka tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran (realisasi) pendapatan dan belanja daerah masih cukup rendah. Penyerapan anggaran yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan program yang berkaitan dengan upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Dari fenomena tersebut maka, peneliti hendak menganalisis dan melakukan perincian apa saja pengeluaran (belanja) daerah pada rentan waktu periode tahun 2013-2022. Peneliti juga hendak menguji apakah pengeluaran daerah (belanja) daerah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

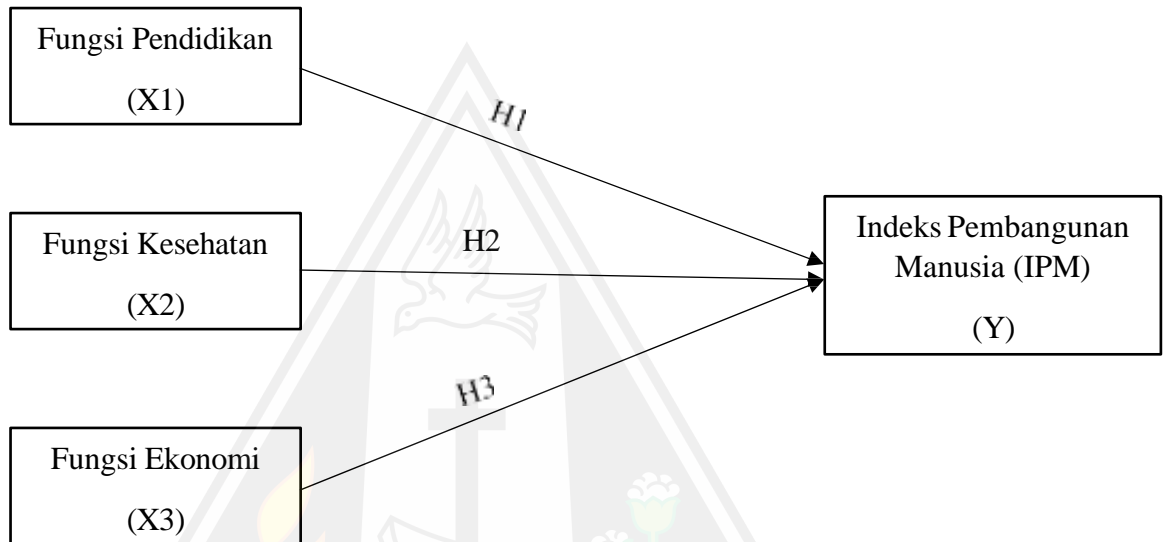
Studi Anantika & Sasana (2020) mengenai hubungan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengeluaran pemerintah (pendidikan, kesehatan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi) menemukan bahwa: 1) Pengeluaran yang dialokasikan pada sektor pendidikan yang tinggi ternyata tidak meningkatkan IPM, 2) Pengeluaran di sektor kesehatan malah mempengaruhi IPM, 3) Korupsi ternyata

mempengaruhi IPM, dan 4) Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat mempengaruhi IPM. Dari hasil penelitian ini memunculkan gap riset antara pengeluaran daerah dan indeks pembangunan manusia. Gap tersebut terlihat pada temuan bahwa alokasi pengeluaran daerah di sektor pendidikan ternyata tidak serta-merta dapat berkorelasi terhadap naiknya kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga dari penelitian sebelumnya Angger (2023) menemukan bahwa tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Bisa dikatakan jika skor IPM di suatu daerah rendah maka dapat dipastikan tingkat kemiskinan tinggi,

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita ketahui bahawa ada ketimpangan dan kesenjangan terkait kualitas sumber daya manusia yang terjadi pada provinsi di Indonesia. Realisasi pengeluaran di sektor krusial seperti sektor pendidikan ternyata tidak menjamin peningkatan angka IPM. Oleh sebab itu peneliti terinspirasi untuk mengambil penelitian tentang **“Menakar Efektivitas Pengeluaran Regional Terhadap Indikator Pembangunan Manusia: Telaah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Ekonomi Tahun 2013-2022”**. Keterbaruan penelitian ini adalah penulis memperluas objek studi yaitu meneliti pengeluaran daerah dan angka IPM pada 34 provinsi di Indonesia periode 2013-2022. Selain itu, peneliti juga mengaitkan topik penelitian ini pada fenomena yang akhir-akhir ini terjadi yaitu terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan laporan dari *World Population Review 2023*, menyebutkan skor rata-rata IQ orang Indonesia di angka 78,49. Hal tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ke-126 dari 199 negara di dunia. Dalam sekala ASEAN, Indonesia dan Timor Leste menempati skor IQ terendah (Kumparan.com, 2023).

1.2 Komponen dan Tautan

Berikut adalah bentuk kerangka pemikiran pada penelitian “Pengaruh Pengeluaran Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Di Indonesia” yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen:



Gambar 1.1. Komponen Dan Tautan

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, penelitian ini mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alokasi dana fungsi pendidikan di tingkat provinsi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pencapaian IPM pada provinsi di Indonesia?
2. Apakah alokasi dana fungsi kesehatan di tingkat provinsi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pencapaian IPM pada provinsi di Indonesia?

3. Apakah alokasi dana fungsi ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pencapaian IPM pada provinsi di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana dampak signifikansi alokasi anggaran pada fungsi pendidikan terhadap IPM.
2. Mengetahui sejauh mana dampak signifikansi alokasi anggaran pada fungsi kesehatan terhadap IPM.
3. Mengetahui sejauh mana dampak signifikansi alokasi anggaran pada fungsi ekonomi terhadap IPM.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi bagi pertama, pihak regulator (Pemerintah). Penelitian ini dapat digunakan oleh regulator untuk memprioritaskan pembangunan manusia. Dengan penelitian ini, pihak regulator dapat menentukan pengeluaran (belanja) daerah yang memicu peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kedua, berkontribusi bagi pihak Akademisi (Dosen & Mahasiswa). Penelitian ini dapat dijadikan *role model* penelitian selanjutnya atau sebagai pembaharuan untuk penelitian bidang akuntansi sektor publik selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi pembelajaran mahasiswa yang menggeluti bidang akuntansi sektor publik.

1.6 Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya akan menyelidiki dan menganalisis pengaruh pengeluaran daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada beberapa provinsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Pengeluaran yang dianalisis terdiri dari pengeluaran di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.



BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN,
DAN PENELITIAN SELANJUTNYA

5.1 Kesimpulan

Dari uraian analisis di bab sebelumnya mengenai hubungan antara pengeluaran daerah (fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi) dengan IPM, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

- a. Pengeluaran Fungsi Pendidikan (FP) secara positif memiliki hubungan (dampak) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian hipotesis 1 **“terdukung”**. Realisasi anggaran di masing-masing provinsi untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan IPM di daerah tersebut. Untuk daerah dengan IPM tinggi menandakan bahwa alokasi anggaran di sektor pendidikan berjalan dengan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan IPM sedang atau rendah menandakan bahwa alokasi anggaran di sektor pendidikan belum maksimal dan belum menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- b. Pengeluaran Fungsi Kesehatan (FK) tidak memiliki hubungan (tidak berdampak) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian hipotesis 2 **“tidak terdukung”**. IPM tiap provinsi di Indonesia bukan bagian dari hasil kebijakan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan atau alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan tidak merepresentasikan pertumbuhan IPM. Hal ini bisa terjadi dikarenakan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor

kesehatan atau investasi di sektor kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak mencerminkan fungsi kesehatan baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu juga ada faktor seperti wabah penyakit yang dapat memicu angka kematian dan tingkat kesehatan masyarakat sehingga terkesan bahwa alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan tidak berdampak pada IPM.

- c. Pengeluaran Fungsi Ekonomi (FE) secara positif memiliki hubungan (dampak) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian hipotesis 3 “**terdukung**”. Realisasi anggaran di masing-masing provinsi untuk fungsi ekonomi memiliki dampak terhadap pertumbuhan IPM di daerah tersebut. Untuk daerah dengan IPM tinggi menandakan bahwa alokasi anggaran di sektor ekonomi berjalan dengan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan IPM sedang atau rendah menandakan bahwa alokasi anggaran di sektor ekonomi belum maksimal baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

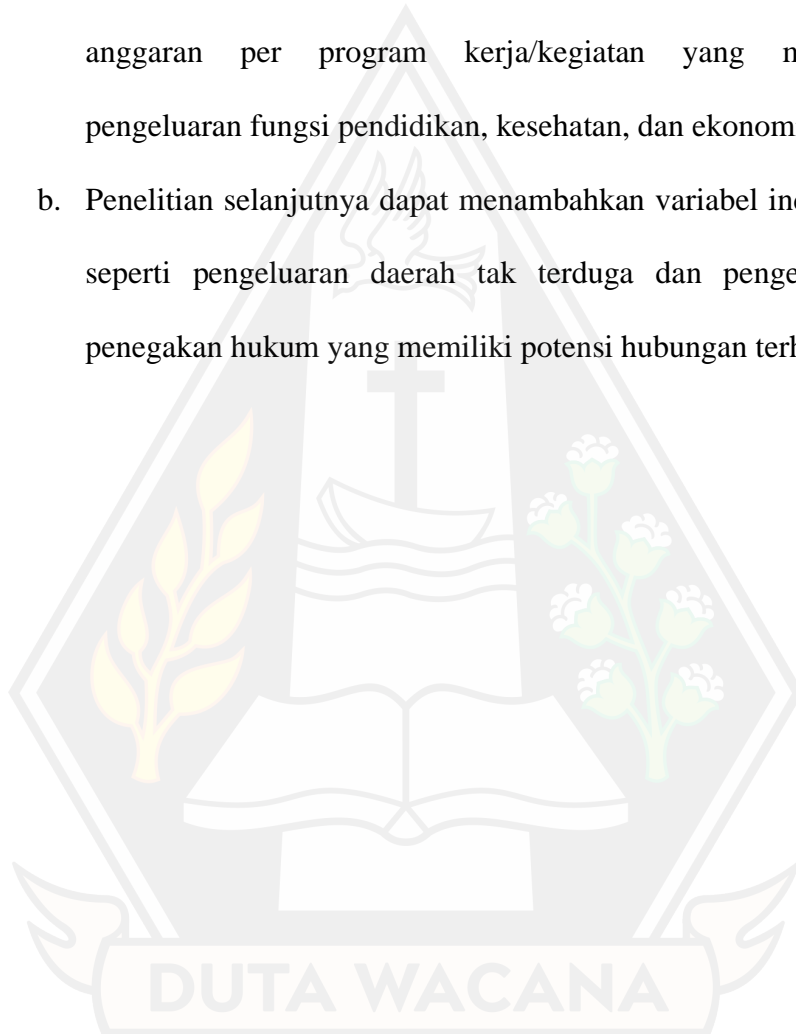
- a. Indikator untuk mengukur dana fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi berdasarkan satuan kerja/institusi pemerintahan terkait (dinas), tidak berdasarkan klasifikasi program kerja atau kegiatan.
- b. Variabel pengeluaran daerah hanya mencakup pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi, berpotensi ada fungsi pengeluaran lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan IPM seperti

pengeluaran daerah tak terduga dan pengeluaran daerah untuk penegakkan hukum.

5.3 Penelitian Selanjutnya

Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data/laporan realisasi anggaran per program kerja/kegiatan yang merepresentasi pengeluaran fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti pengeluaran daerah tak terduga dan pengeluaran untuk penegakan hukum yang memiliki potensi hubungan terhadap IPM.



DAFTAR PUSTAKA

- Anantika, Dita Ayu Sasana, H. (2020). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, KORUPSI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA APEC. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 9(3), 167–178. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Angger Gigih Prasetyo, B. F. (2023). *PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. 2(4), 760–773.
- Aviyati, S. (2016). Analisis Pengaruh Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Iqtishoduna*, 10(2), 120–128. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3585>
- Dua, M. (2008). *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. PT Kanisius.
- Farida, Nur, Suman, Sakti, A., & Kresna, R. (2021). Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 1–9.
- Gorontalo, P. P. (2015). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014*.
- Gujarati, D. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga.
- Hasan, Z. (2021). the Effect of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainability*, 3(No.1), 42–53. <https://doi.org/10.32890/jes2021.3.1.5>
- Ike Safitri, M., Fajri Ananda, C., & Prasetyia, F. (2019). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127.
- Kumparan.com. (2023). *Rata-rata IQ Orang Indonesia dan Negara Lain di Asia Tenggara*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/rata-rata-iq-orang-indonesia-dan-negara-lain-di-asia-tenggara-21g9Vxiiy1V/full>
- Maluku, P. P. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018*.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*.
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255–270. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.474>
- Nella Allo, Robby Kumaat, A. T. N. (2023). *PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), PENGELUARAN DAERAH DAN*

JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA. 23(6), 73–84.

- Noviatamara, Ayu Ardina, Tiffany Amalia, N. (2019). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Riset Ekonomi Pembangunan, 4(2)*, 119–127. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Oates, W. E. (2006). *On the theory and practice of fiscal decentralization*. IFIR Working Paper.
- Onabote, A. A., Ohwofasa, B. O., & Ogunjumo, R. A. (2023). Government sectoral spending and human development in Nigeria: Is there a link? *Heliyon, 9(7)*, e17545. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17545>
- Palayukan, M. (2019). *PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI TENGGARA. 12, 74–91.*
- PEMENDAGRI. (2023). *PEMENDAGRI No. 84 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 31–41.*
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance, 5(2012)*, 615–622. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5)
- Sandjaja, F. R., Nafisa, F., & Manurung, I. N. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja, 12(1)*, 21–31. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.21-31>
- Saputra, D. A., & Atmojo, M. E. (2021). Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2(2)*, 68–84. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i2.18>
- Sincovich, A., Gregory, T., Zanon, C., Santos, D. D., Lynch, J., & Brinkman, S. A. (2020). Measuring early child development in low and middle income countries: Investigating the validity of the early Human Capability Index. *SSM - Population Health, 11*, 100613. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100613>
- Tempo, K. (2023). *Penyebab Rendahnya Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD*. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-optimalisasi-pemanfaatan-dana-insentif-fiskal-sebagai-upaya-percepatan>
- Zhong, F., Chen, R., Luo, X., Song, X., & Ullah, A. (2024). Assessing regional resilience in China using a sustainable livelihoods approach: Indicators, influencing factors, and the relationship with economic performance. *Ecological Indicators, 158(August 2021)*, 111588. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111588>